

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) saat ini telah bertransformasi menjadi ancaman eksistensial yang sangat serius bagi bangsa Indonesia. Masalah ini tidak lagi sekadar dilihat sebagai pelanggaran hukum atau tindakan kriminal semata, melainkan telah menjadi masalah sosial, kesehatan, dan keamanan yang sangat kompleks, sistemik, dan multidimensi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak fisik dan mental individu pengguna, tetapi juga merambat hingga menghancurkan tatanan kehidupan keluarga, melumpuhkan produktivitas ekonomi, hingga mengganggu stabilitas sosial dan politik negara.

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan tren yang terus mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahguna dan korban narkotika tersebar di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak usia dini, pelajar, mahasiswa, pekerja formal maupun informal, hingga aparat penegak hukum. Yang lebih memprihatinkan adalah tren usia pertama kali mencoba narkoba semakin muda, yang mengindikasikan bahwa generasi penerus bangsa berada dalam posisi yang sangat rentan. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan akan mengalami penurunan drastis, yang pada akhirnya akan menghambat laju pembangunan nasional.

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia serta menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan budaya, tidak luput dari serangan bahaya ini. Wilayah yang strategis dan padat penduduk justru

menjadi lahan subur bagi peredaran dan penyalahgunaan zat berbahaya tersebut. Kerawanan ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan melingkar, yang dalam konteks sosial sering diringkas dalam istilah SEBLAK, yaitu: Sosial, Ekonomi, Budaya, *Lifestyle*, Adiksi, Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran.

Melihat kompleksitas dan akar masalah yang sedemikian dalam, maka strategi penanganan yang digunakan pun harus komprehensif. Pendekatan yang bersifat represif atau penindakan hukum saja dirasa tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Jika hanya mengandalkan penangkapan dan pemenjaraan, maka masalah ini ibarat memotong rumput liar yang akan tumbuh kembali selama akar dan tanahnya masih subur. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma penanganan, yaitu dari yang semata-mata bersifat *law enforcement* menjadi pendekatan yang lebih humanis, yaitu melalui Pencegahan (*Prevention*) dan Pemberdayaan (*Empowerment*).

Di sinilah peran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat menjadi sangat vital dan menentukan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotik Nasional (BNN) memiliki mandat yang luas tidak hanya dalam pemberantasan, tetapi juga dalam upaya preventif dan rehabilitatif. Visi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat yaitu: "Mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sehat bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam rangka mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang" menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh kegiatan ini adalah pembangunan manusia Indonesia yang unggul, sehat, dan berkarakter.

Salah satu unit kerja yang menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi tersebut adalah Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Bidang ini memiliki tugas pokok untuk merubah pola pikir masyarakat agar sadar akan bahaya narkoba, serta membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat agar memiliki ketahanan diri (*resilience*) untuk menolak segala bentuk tawaran narkoba. Konsep pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di sini memiliki makna yang dalam. Pemberdayaan bukan bermakna sekadar kegiatan seremonial, pemberian bantuan materi, atau kegiatan sosial biasa. Lebih dari itu, pemberdayaan adalah proses memampukan (*enabling*), memandirikan, dan memberdayakan individu maupun kelompok agar memiliki kekuatan (*power*) untuk mengatur dan menentukan nasib sendiri. Dalam pelaksanaannya, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) menjalankan berbagai program strategis, mulai dari Pencegahan Primer, Pencegahan Sekunder, Pencegahan Tersier.

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program-program tersebut sangat relevan dengan metode *Participatory Action Research (PAR)*. Metode ini menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai objek yang pasif yang hanya menerima instruksi, melainkan sebagai subjek yang aktif terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi. Prinsip partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan menjadi kunci utama keberhasilan program.

Berdasarkan uraian fakta, data, dan pemikiran di atas, penulis merasa tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul: “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pencegahan Dan Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika

(*Participatory Action Research* Pada Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat)” penelitian ini diharapkan dapat menunjukan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program pencegahan dan deteksi dini yang di laksanakan oleh bidang pencegahan dan pemberdayan masyarakat (P2M) di badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Jawa Barat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan maka fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pencegahan, Deteksi Dini, Serta Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Laksanakan Oleh Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat.
2. Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Setiap Program Yang Dilaksanakan Sesuai Prinsip *Participatory Action Research* (PAR).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan, deteksi dini serta pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat.
2. Mengetahui dan menganalisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Setiap

Program Yang Dilaksanakan Sesuai Prinsip *Participatory Action Research* (PAR).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat mengenai penerapan metode *Participatory Action Research* (PAR) dalam penanganan masalah sosial. Selain itu, dapat menjadi referensi teoritis dan praktis bagi penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat: Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk menyempurnakan program kerja di bidang pencegahan dan pemberdayaan agar lebih partisipatif dan berkelanjutan.
- b. Bagi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman, kesadaran kritis, dan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan yang sehat dan produktif.
- c. Bagi Peneliti: Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari dan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian tindakan partisipatif.

E. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dalam penelitian ini dibangun dan didasarkan pada beberapa teori utama yang relevan, saling melengkapi, dan menjadi acuan utama dalam memahami, menganalisis, serta menjelaskan fenomena

pemberdayaan masyarakat melalui pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Teori pertama yang digunakan adalah teori pemberdayaan menurut Suharto (2009), yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan serangkaian upaya sistematis untuk membangun daya, kekuatan, dan potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat, melalui cara mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang ada di dalam diri mereka. Konsep ini menegaskan bahwa pemberdayaan bukan sekadar pemberian bantuan materiil semata, melainkan proses mengembangkan potensi tersebut menjadi kemampuan yang bernilai dan bermanfaat, sehingga menjadikan masyarakat mampu berdiri sendiri serta berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di lingkungannya. Dalam konteks penelitian ini, teori ini menjadi dasar pemikiran utama bahwa masyarakat harus dibekali kemampuan agar tidak hanya menjadi objek penerima kebijakan, melainkan bertransformasi menjadi subjek utama yang berdaya mengatasi ancaman penyalahgunaan narkoba.

Pemahaman mengenai pemberdayaan tersebut semakin diperkaya dan dipertegas oleh kerangka pemikiran Jim Ife (1995) yang tertuang dalam bukunya *Community Development: Creating Communities Alternatives*. Menurut pandangan ini, pemberdayaan dipahami sebagai proses sekaligus hasil akhir dari upaya membangun kembali kekuatan masyarakat yang semula terhambat, tereduksi, atau belum berkembang sepenuhnya, sehingga masyarakat memiliki kemampuan, kewenangan, serta kendali penuh atas kehidupannya, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan yang

memengaruhi nasib mereka sendiri. Secara struktural, Jim Ife merumuskan bahwa pemberdayaan dibangun di atas empat elemen dasar yang saling berkaitan dan menjadi prasyarat mutlak terbentuknya kekuatan masyarakat, yaitu Sumber Daya, Kesempatan, Pengetahuan, dan Keterampilan. Sumber daya dimaknai sebagai segala modal dasar manusia, sosial, budaya, maupun fasilitas yang terbagi menjadi kapabilitas atau kekuatan internal berupa kesadaran dan kerja sama, serta sarana atau dukungan eksternal berupa fasilitas dan jaringan kerja sama. Elemen Kesempatan menegaskan bahwa ketidakberdayaan sering kali muncul bukan karena ketidakmampuan masyarakat, melainkan karena tertutupnya akses dan ruang partisipasi, sehingga pemberdayaan berarti menjamin hak berperan serta yang setara.

Selanjutnya, Pengetahuan menjadi elemen paling krusial di mana Jim Ife menegaskan bahwa tidak ada pemberdayaan tanpa kesadaran, dan tidak ada kesadaran tanpa pengetahuan yang cukup. Terakhir, Keterampilan didefinisikan sebagai kemampuan teknis dan sosial untuk menerapkan pengetahuan menjadi tindakan nyata, yang berfungsi sebagai jembatan utama antara pemahaman dengan perbuatan. Keempat elemen ini jika dikembangkan secara bersamaan akan melahirkan dua capaian utama pemberdayaan, yaitu terbentuknya kemampuan bertindak serta terwujudnya kemandirian masyarakat seutuhnya, yang dalam penelitian ini diterjemahkan melalui peningkatan pengetahuan bahaya narkoba, pelatihan keterampilan hidup, serta pemberian ruang berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Terakhir, *Participatory Action Research* (PAR) yang dikemukakan oleh Kemmis dan McTaggart menjadi landasan utama dalam metode pelaksanaan penelitian ini. Menurut teori ini, proses penelitian dan pemberdayaan masyarakat harus dijalankan melalui siklus berulang yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Ciri utama dari pendekatan ini adalah keterlibatan serta partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatan, di mana masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek penelitian, melainkan menjadi mitra sejati yang terlibat mulai dari penyusunan program, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil yang dicapai. Pendekatan ini selaras sepenuhnya dengan prinsip pemberdayaan menurut Jim Ife, yang menekankan bahwa pembangunan masyarakat harus berbasis pada kebutuhan nyata, potensi yang ada, serta bertujuan mencapai kemandirian. Melalui siklus *Participatory Action Research* (PAR) ini, seluruh program yang dijalankan diharapkan terus mengalami perbaikan secara berkelanjutan dan mampu memberikan dampak perubahan nyata yang dapat dilanjutkan sendiri oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, teori tersebut membentuk satu kesatuan kerangka berpikir yang utuh dan saling mendukung. di mana teori pemberdayaan menjadi tujuan utama, teori sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan menjadi bentuk operasional kegiatannya, serta *Participatory Action Research* (PAR) menjadi metode pelaksanaannya, sehingga seluruhnya menjadi landasan yang kuat untuk memahami dan menganalisis bagaimana masyarakat diberdayakan dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba.

2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan kerangka berpikir yang menjembatani teori-teori yang telah dipaparkan dengan fenomena nyata yang terjadi di lapangan, sehingga membentuk sebuah konsep operasional yang jelas mengenai arah dan tujuan penelitian ini. Berdasarkan teori pemberdayaan, teori pencegahan, serta metode *Participatory Action Research* (PAR) yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan sebuah pemahaman bahwa penanganan masalah penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan harus dilihat sebagai sebuah persoalan pembangunan manusia dan perubahan sosial yang menyeluruh.

Konsep dasar yang dikembangkan dalam penelitian ini berpijak pada kesadaran bahwa narkoba adalah musuh bersama yang mengancam eksistensi bangsa. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak boleh hanya bersifat parsial atau sesaat, tetapi harus bersifat komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Paradigma yang digunakan adalah pergeseran dari penanganan yang semata-mata bersifat represif atau kriminalisasi menuju pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan konstruktif, yaitu melalui pendekatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konsep operasionalnya, pemberdayaan masyarakat yang dimaksud bukanlah kegiatan sosial yang bersifat charity atau pemberian bantuan yang bersifat konsumtif. Lebih dari itu, pemberdayaan di sini dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana untuk membangun kesadaran kritis (*critical awareness*), meningkatkan kapasitas atau kemampuan (*capacity building*), serta membentuk kemandirian (*independency*) pada diri individu dan komunitas.

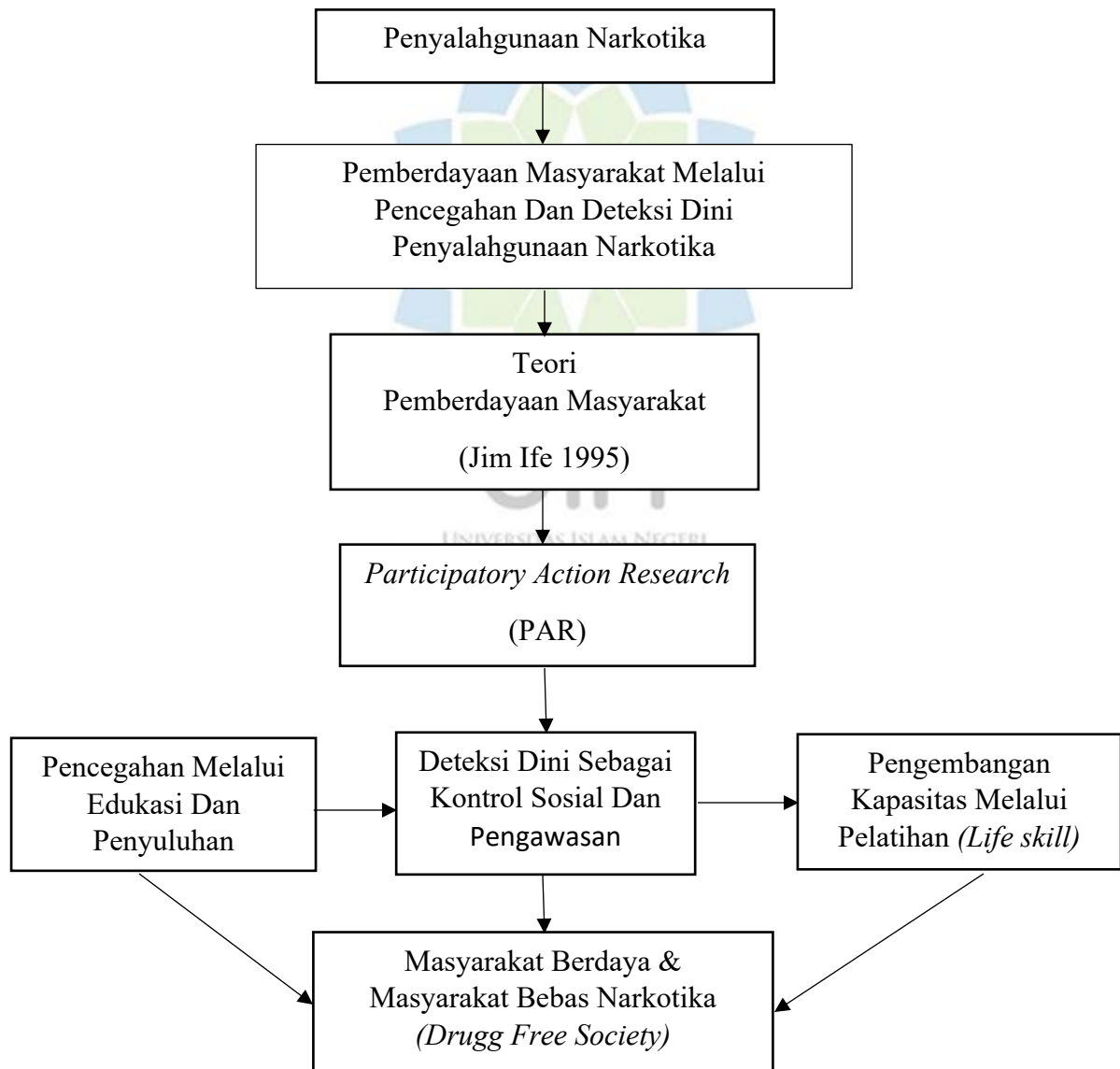
Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek yang pasif menunggu perlakuan, melainkan diangkat menjadi subjek yang aktif, memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*), dan berperan langsung dalam menjaga keamanan serta kesehatan lingkungannya sendiri.

Implementasi konsep ini dijabarkan ke dalam tiga pilar utama kegiatan yang saling mengisi dan melengkapi. Pilar pertama adalah upaya Pencegahan (*Prevention*) melalui edukasi dan penyuluhan. Pilar kedua adalah Deteksi Dini (*Early Detection*) sebagai bentuk kontrol sosial dan pengawasan. Pilar ketiga adalah Pengembangan Kapasitas melalui Pelatihan Keterampilan (*Life skill*). Konsep ini menjawab tantangan faktor ekonomi, kebosanan, dan kurangnya kegiatan positif yang sering menjadi pemicu seseorang terjerat narkoba. Dengan memberikan bekal keterampilan yang bernilai ekonomi, masyarakat diarahkan untuk memiliki kegiatan yang produktif dan menghasilkan.

Seluruh rangkaian konsep dan kegiatan tersebut dijalankan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Artinya, dari mulai perencanaan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan tindakan, pengamatan, hingga evaluasi dan refleksi, semuanya dilakukan secara bersama-sama dan partisipatif. Proses yang berulang dalam siklus *Participatory Action Research* (PAR) ini memungkinkan terjadinya perbaikan terus-menerus sehingga program yang dijalankan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menimbulkan dampak perubahan yang nyata, bermakna, dan dapat dilanjutkan oleh masyarakat sendiri secara mandiri.

Dengan demikian, landasan konseptual ini memvisualisasikan bahwa melalui sinergi yang kuat antara peran pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat dan partisipasi aktif masyarakat, akan tercipta sebuah kondisi sosial yang diharapkan, yaitu masyarakat yang tidak hanya sehat secara fisik dan mental serta bebas dari narkoba, tetapi juga masyarakat yang berdaya, maju, sejahtera, dan memiliki karakter yang tangguh.

3. Kerangka Konseptual



F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BNNP Jabar Lokasi ini dipilih karena lokasi ini merupakan Lembaga strategis yang relevan dengan judul yang diambil dimana BNNP adalah pusat pelaksanaan program dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Meskipun demikian, masih terdapat peluang untuk lebih mengoptimalkan potensi masyarakat dengan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika, dengan metode *Participatory Action Research* (PAR) guna menciptakan solusi berkelanjutan dan memperkuat dampak positif terhadap masyarakat.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir, sistem nilai, dan cara pandang yang digunakan oleh peneliti untuk memahami realitas sosial serta menjelaskan hubungan antar variabel dalam sebuah kajian ilmiah. Pemilihan paradigma yang tepat sangat menentukan arah dan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Berdasarkan karakteristik masalah, tujuan penelitian, serta judul yang diangkat, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paradigma Konstruktivis atau sering juga disebut sebagai paradigma Naturalistik. Paradigma konstruktivis berpandangan bahwa realitas sosial bersifat dinamis, kompleks, dan tidak dapat dipisahkan dari interaksi antarmanusia serta konteks budaya yang melingkupinya. Realitas tidak dilihat sebagai sesuatu yang statis dan kaku, melainkan sesuatu yang terbentuk melalui proses, pengalaman bersama, dan pemaknaan subjektif dari para pelaku di

lapangan. Dalam konteks penelitian ini, paradigma ini sangat relevan karena peneliti tidak memandang kegiatan pemberdayaan masyarakat, pencegahan, maupun deteksi dini sebagai sekadar prosedur administratif atau teknis semata.

Peneliti memandang bahwa fenomena tersebut merupakan sebuah proses sosial yang melibatkan hubungan emosional, partisipasi aktif, komunikasi, dan kerjasama yang terbangun antara pihak pelaksana program yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat dengan masyarakat sasaran. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari indikator kuantitatif seperti jumlah peserta atau frekuensi kegiatan, tetapi juga harus dilihat secara mendalam dari aspek perubahan perilaku, tumbuhnya kesadaran kolektif, meningkatnya kemandirian ekonomi, hingga terbentuknya sistem pengawasan sosial yang kuat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peneliti hadir secara langsung di lapangan untuk berinteraksi, menggali makna, dan memahami kondisi yang sebenarnya terjadi sesuai dengan perspektif para pihak yang terlibat.

Berdasarkan paradigma konstruktivis yang telah diuraikan di atas, maka pendekatan yang digunakan secara spesifik dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Partisipatif atau yang lebih dikenal dengan istilah *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang sangat sesuai dan selaras dengan judul serta tujuan penelitian, yaitu ingin melihat secara komprehensif bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui proses tindakan nyata dan keterlibatan penuh dari masyarakat itu sendiri.

Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) memiliki tiga pilar utama yang menjadi dasarnya. Pilar pertama adalah Partisipasi. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek pasif yang hanya diamati atau didata, melainkan ditempatkan sebagai subjek yang aktif dan mitra setara. Masyarakat dilibatkan secara menyeluruh mulai dari tahap awal perencanaan program, pelaksanaan kegiatan yang meliputi edukasi, pelatihan keterampilan, hingga pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine, sampai pada tahap akhir evaluasi dan refleksi bersama. Keterlibatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) serta rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan program yang dijalankan.

Pilar kedua adalah Tindakan atau Action. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada pengumpulan data atau deskripsi teori semata, tetapi terdapat upaya nyata atau intervensi untuk melakukan perubahan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat. Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi strategi pemberdayaan melalui pencegahan dan deteksi dini yang bertujuan konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar terhindar dari bahaya narkoba dan memiliki kemandirian ekonomi yang baik.

Pilar ketiga adalah Refleksi atau *Reflection*. Setelah tindakan dilakukan, terdapat proses evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama antara peneliti, pelaksana, dan masyarakat. Tahapan ini sangat krusial untuk melihat apa saja kekurangan, kelebihan, hambatan, serta dampak yang telah terjadi selama proses berlangsung, sehingga dapat dirumuskan perbaikan pada siklus berikutnya menuju kondisi yang lebih baik, maksimal, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) ini menjadi pisau analisis utama yang mampu menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan berjalan secara dinamis dan partisipatif di lapangan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dengan pendekatan kualitatif, yang dipilih karena isu yang dikaji dalam konteks pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. *Participatory Action Research* (PAR) menempatkan seluruh aktor, termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat, komunitas, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media sebagai subjek yang berpartisipasi langsung dalam analisis masalah sekaligus perumusan tindakan. Metode *Participatory Action Research* (PAR) berangkat dari prinsip bahwa perubahan sosial tidak dapat dihasilkan oleh peneliti saja, tetapi harus diciptakan secara kolaboratif melalui tindakan nyata bersama komunitas yang terdampak.

Hal ini sangat selaras dengan konteks penelitian ini, karena upaya pencegahan dan deteksi dini narkoba hanya dapat efektif apabila seluruh unsur Pentahelix terlibat secara aktif sebagai bagian dari proses, bukan sekadar penerima manfaat program. Model kolaborasi yang ditekankan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat memang menuntut adanya kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dinamika kerja sama, dan tantangan lapangan yang muncul selama pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Sebagaimana dijelaskan oleh Pahleviannur et al. (2022), Ramdhan (2021), dan Wibowo (2021), penelitian kualitatif bersifat induktif dan memungkinkan peneliti menggali data empirik secara terbuka, fleksibel, dan mendalam. Teknik ini sangat penting dalam *Participatory Action Research* (PAR), karena data tidak hanya dipahami sebagai informasi, tetapi sebagai dasar untuk melakukan refleksi dan aksi kolektif.

Dalam konteks *Participatory Action Research* (PAR), metode kualitatif seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok partisipatif, observasi partisipatif, dan analisis dokumen menjadi instrumen utama untuk menangkap dinamika partisipasi dan proses aksi sosial. Melalui metode ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana strategi pencegahan dan deteksi dini narkotika dijalankan, bagaimana hambatan muncul dalam praktik, serta bagaimana interaksi masyarakat membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM).

Karakter utama *Participatory Action Research* (PAR) yang melibatkan siklus aksi-refleksi-aksi memungkinkan penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mendorong lahirnya perbaikan praktik pencegahan dan deteksi dini. Proses refleksi bersama dengan pelaksana program Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat dan masyarakat membantu mengidentifikasi kelemahan, merancang langkah

perbaikan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor yang menjadi landasan strategi masyarakat bebas narkoba (*Drug Free Society*). Dengan demikian, penelitian tidak hanya menghasilkan data yang kontekstual, mendalam, dan kaya makna, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas program pencegahan dan deteksi dini narkoba. Melalui partisipasi aktif Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat dan seluruh unsur masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat upaya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman narkoba.

Proses pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang sistematis, logis, dan saling berkaitan. Tahapan ini dirancang agar perubahan yang terjadi dapat berjalan secara bertahap namun menyeluruh, sebagaimana dijelaskan oleh Afandi et al. (2022). Oleh karena itu berikut penjelasan tahapan-tahapan dalam pendekatan *Participatory Action Research* (PAR):

a. Tahap *To Know* (Mengetahui Kondisi Nyata Komunitas)

Tahap awal ini merupakan fase pendekatan dan pembauran. Tahap ini mencakup proses inkulturasi, yaitu upaya sungguh-sungguh dari peneliti untuk masuk dan berbaur dengan kehidupan masyarakat guna membangun rasa saling percaya (*trust*) dan kenyamanan. Pembauran yang dimaksud tidak sekadar hadir secara fisik, melainkan terlibat dalam kesepakatan bersama melalui pembentukan kelompok.

Melalui kelompok-kelompok tersebut, masyarakat diajak untuk mulai mengenali potensi dan kondisi lingkungannya sendiri. Kelompok ini bisa berupa kelompok yang sudah ada sebelumnya, seperti kelompok keagamaan (yasinan, pengajian), kelompok profesi (petani, pengrajin), kelompok seni, maupun kelompok perempuan. Kelompok-kelompok ini berfungsi sebagai modal sosial (*social capital*) yang sangat penting untuk menggali gambaran kondisi masyarakat secara rinci, menyeluruh, dan mendalam sebelum masuk pada tahap analisis masalah.

b. Tahap *To Understand* (Memahami Masalah Masyarakat)

Setelah kondisi diketahui, tahap selanjutnya adalah berusaha memahami secara mendalam mengenai permasalahan utama yang dihadapi. Proses ini dilakukan melalui analisis bersama yang sering disebut sebagai tahap dekodifikasi, yaitu kegiatan menyusun dan merapikan berbagai persoalan sosial yang muncul agar menjadi jelas dan terstruktur.

Biasanya, tahap ini dilaksanakan melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan memanfaatkan berbagai instrumen bantu yang memudahkan proses analisis sekaligus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan teknik dan media pembelajaran yang populer dan mudah dipahami sangat penting sebagai bagian dari proses pendidikan kritis masyarakat (Afandi et al., 2022).

c. Tahap *To Plan* (Merencanakan Pemecahan Masalah)

Tahap ini merupakan fase penyusunan strategi dan aksi nyata untuk memecahkan masalah. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada kejelasan rumusan masalah yang telah disepakati pada tahap sebelumnya. Sangat ditekankan bahwa solusi yang diambil harus benar-benar lahir dari kesepakatan bersama dan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar masalah yang "dititipkan" atau dipaksakan oleh peneliti dari luar.

Seringkali terjadi kesalahan persepsi di mana masyarakat menganggap peneliti sebagai pihak yang paling mampu menyelesaikan semua masalah, sehingga mereka cenderung pasif. Oleh karena itu, sejak awal partisipasi harus dibangun secara murni agar masyarakat merasa memiliki tanggung jawab dan kapasitas untuk berkontribusi, sehingga perubahan sosial nantinya benar-benar lahir dari kesadaran dan kebutuhan mereka sendiri.

d. Tahap *To Act* (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah)

Tahap ini adalah wujud nyata dari perencanaan yang telah matang, yaitu fase implementasi program. Setiap program aksi yang dijalankan harus memiliki keterkaitan yang kuat dan selaras dengan masalah yang telah dianalisis sebelumnya. Bentuk kegiatannya dapat bersifat praktis dan langsung dirasakan manfaatnya, namun tetap memperhatikan potensi sumber daya yang ada agar tidak membebani masyarakat.

Dalam tahap ini, nilai-nilai kebersamaan seperti tradisi gotong royong sangat diutamakan. Secara teoritis, program semacam ini dipahami

sebagai daur praktis yang menghubungkan realitas masalah dengan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan, sehingga menghasilkan keberlanjutan (sustainability) dan mendorong terjadinya perubahan sosial secara bertahap dan evolutif.

e. Tahap *To Reflection* (Membangun Kesadaran untuk Perubahan Keberlanjutan)

Tahap akhir ini berisi kegiatan evaluasi dan refleksi mendalam terhadap seluruh hasil yang telah dicapai selama proses berlangsung. Refleksi tidak hanya dilakukan oleh tim peneliti secara internal, tetapi juga dilaksanakan bersama masyarakat agar terbentuk proses pembelajaran kolektif yang berharga.

Melalui refleksi ini, berbagai aktivitas dikaji ulang untuk mencari hikmah dan pelajaran berharga. Dari proses inilah diharapkan lahir komitmen bersama untuk melanjutkan program dan memastikan bahwa perubahan yang terjadi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pengetahuan baru dan kesepakatan yang terbentuk dari proses ini menjadikan seluruh rangkaian kegiatan memiliki makna yang konstruktif bagi kedua belah pihak (Afandi et al., 2022:23-24).

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Menurut sugiyono (2015) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema atau gambar. Hardani (2020) menjelaskan bahwa data kualitatif diperoleh

melalui pendekatan deduktif-induktif dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, serta dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan masalah. Sehingga penelitian disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Handayani 2020).

Dengan demikian, data kualitatif pada penelitian ini mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan observasi, dan dokumen-dokumen terkait. Data ini memberikan gambaran untuk menggali fokus informasi terkait proses pemberdayaan masyarakat melalui pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. serta membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis pihak-pihak yang terlibat untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat melalui pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba, lanjut atau implikasi praktis dari temuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Berbeda dengan penelitian kualitatif konvensional yang hanya berfokus pada pemaknaan subjek, jenis data dalam penelitian ini diarahkan secara pragmatis untuk menghasilkan informasi yang fungsional dan berbasis solusi. Data kualitatif yang dikumpulkan tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk uraian deskriptif, narasi tematik, dan skema operasional yang mencakup tiga kategori utama:

Pertama, Data Implementasi Operasional. Data ini mencakup uraian mendalam mengenai bagaimana program promosi kesehatan kerja dan mekanisme deteksi dini dijalankan secara aktual di lapangan. Data ini

berbentuk deskripsi alur prosedur (SOP), dokumentasi aktivitas penyuluhan, serta catatan pelaksanaan tes urine di berbagai sektor. Tujuan dari jenis data ini adalah untuk mendapatkan gambaran riil mengenai efektivitas praktik pencegahan yang sudah berjalan di bawah naungan Badan Narkotika Nasioanl Provinsi (BNNP) Jawa Barat.

Kedua, Data Hambatan Teknis (*Problem-Based Data*). Jenis data ini berfokus pada identifikasi kendala konkret yang dihadapi oleh masing-masing pilar. Data ini merekam secara detail hambatan komunikasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran, kendala legal-administratif, hingga resistensi sosial (stigma) yang menghambat jalannya program promosi kesehatan. Data ini diposisikan sebagai instrumen evaluasi untuk menemukan celah (*gap*) antara kebijakan yang direncanakan dengan kenyataan di lapangan.

Ketiga, Data Strategis-Aplikatif. Jenis data ini bersifat proaktif, berisi gagasan-gagasan solutif, rekomendasi kebijakan, dan pola kolaborasi baru yang diusulkan oleh para informan ahli maupun pelaksana di lapangan. Data ini mencakup draf model kerjasama lintas sektor, ide pemanfaatan teknologi informasi untuk deteksi dini, serta strategi diseminasi informasi melalui media. Dalam paradigma pragmatis, data ini merupakan jenis data yang paling krusial karena akan digunakan sebagai bahan utama dalam merumuskan model kolaborasi yang efektif untuk melindungi masyarakat.

Secara keseluruhan, data kualitatif dalam penelitian ini dikumpulkan melalui transkrip wawancara, catatan observasi partisipatif, dan analisis

dokumen organisasi. Seluruh data tersebut diproses untuk menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya kaya secara teoretis, tetapi juga memiliki nilai guna praktis bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang mampu menghasilkan informasi berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan (Judijanto dan Wibowo 2024). Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama di lapangan melalui interaksi atau observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data ini merupakan data utama yang sangat menentukan dalam penelitian, yang meliputi hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang P2M, petugas pelaksana, tokoh masyarakat, dan peserta program, serta hasil observasi langsung saat kegiatan penyuluhan, pelatihan *life skill*, dan pelaksanaan tes urine berlangsung. Selain itu, tanggapan, persepsi, dan pengalaman nyata dari masyarakat sasaran mengenai dampak program yang dijalankan juga menjadi bagian penting dari data primer.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui media perantara atau data yang sudah dikembangkan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa peneliti

berperan sebagai pihak kedua, karena tidak mendapat informasi secara langsung dari sumber utama. Sumber data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi instansi seperti struktur organisasi, visi dan misi, serta tupoksi kerja, laporan kegiatan bulanan maupun tahunan yang berkaitan dengan program pemberdayaan dan deteksi dini, peraturan perundang-undangan, buku referensi, artikel ilmiah, serta arsip-arsip penting lainnya seperti dokumentasi foto kegiatan dan daftar hadir peserta yang relevan dengan penelitian.

5. Informan dan Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2020). Dalam konteks penelitian ini, informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan yang signifikan melalui pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Kriteria informan yang dipilih mencakup staff bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat, serta individu lain yang dianggap relevan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti dapat memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki kapasitas untuk memberikan wawasan yang berharga mengenai dinamika pemberdayaan masyarakat melalui pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Selain itu, teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif yang beragam dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kompleksitas situasi yang ada di lapangan. Dengan demikian, *purposive sampling* menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan penelitian dan menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pencegahan dan deteksi dini narkoba

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (*Participation Observation*). Observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat yang menjadi sektor utama dalam melindungi SDM melalui deteksi dini dan penyalahgunaan narkoba. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap objek yang diteliti. Nasution dalam Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa observasi dilakukan agar peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga diperoleh pandangan yang holistik.
- b. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*). Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan adalah teknik semiterstruktur yang mana dalam pelaksanaannya lebih bebas, fleksibel dan tidak terpacu pada pedoman wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan informan yang berkaitan *stakeholders* yang terlibat pada pemberdayaan masyarakat melalui pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Pada saat wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

- c. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian merupakan aspek penting yang menunjukkan bahwa kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan benar dan tepat, sesuai dengan karakteristik keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, salah satu cara untuk memastikan pertanggungjawabkan atas penelitian yang dilakukan adalah

melalui tahapan pemeriksaan keabsahan data. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah pendekatan analisis data yang mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. (Norman K. Denkin 2012) mendefinisikan triangulasi sebagai penggabungan atau kombinasi berbagai metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang saling berhubungan dari berbagai sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

8. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2020) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intensif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk merangkum, memilih informasi penting, serta

memfokuskan data pada aspek-aspek yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan hasil pengumpulan data berupa studi dokumen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat, literatur terkait, serta landasan teoritis yang digunakan, dapat direduksi bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini berpusat pada ancaman penyalahgunaan narkotika terhadap kualitas dan ketahanan Sumber Daya Manusia (SDM). Penyalahgunaan narkotika dipahami sebagai ancaman strategis yang dapat merusak produktivitas, kesehatan fisik dan mental, serta integritas sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor kerja yang berada dalam usia produktif.

Reduksi data juga menunjukkan bahwa strategi penanganan narkotika yang selama ini diterapkan lebih banyak bersifat kuratif dan represif, sehingga belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akan pendekatan baru berupa pencegahan dan deteksi dini yang lebih sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan. penyalahgunaan narkotika bukan sekadar masalah individu, tetapi masalah multi-level yang memerlukan keterlibatan beragam aktor untuk menyelesaikannya. Reduksi data pada tahap ini memperjelas fokus penelitian pada tiga aspek utama: (1) efektivitas pencegahan dan deteksi dini, (2) tantangan implementasi, dan (3) pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan (*life skill*).

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses reduksi, data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik agar memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antarvariabel. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam dua fokus utama penelitian.

Pertama, terkait pelaksanaan program pencegahan, deteksi dini, dan pemberdayaan masyarakat, data menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat telah menerapkan berbagai strategi mulai dari edukasi, penyuluhan bahaya narkoba, pelaksanaan tes urine, hingga pelatihan keterampilan (*life skill*) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala terkait cakupan sasaran yang belum merata, ketersediaan sarana prasarana, serta keberlanjutan program pasca-intervensi.

Kedua, berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat sesuai prinsip *Participatory Action Research* (PAR), data memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat mulai terbangun mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek yang ikut menentukan dan menjalankan kegiatan. Meskipun demikian, data juga mengindikasikan bahwa partisipasi tersebut belum sepenuhnya maksimal di semua tahapan, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam upaya pemberdayaan ini.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan merupakan proses untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan dari data yang telah direduksi dan disajikan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat melalui pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat telah berjalan cukup baik melalui program edukasi, penyuluhan, tes urine, dan pelatihan keterampilan (*life skill*). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti cakupan wilayah yang belum merata, keterbatasan sumber daya, serta keberlanjutan program yang belum maksimal.

Selanjutnya, temuan menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada penerapan prinsip *Participatory Action Research* (PAR), di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek yang terlibat aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kesimpulan ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci utama agar program pencegahan dan pemberdayaan dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.

Dalam tahap verifikasi, kesimpulan yang dihasilkan diperiksa kembali dengan membandingkan antara data primer dan sekunder, teori yang digunakan, serta hasil temuan yang muncul secara berulang selama proses analisis. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kesimpulan penelitian

konsisten dengan fakta empiris dan teori yang mendukung. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun strategi pemberdayaan yang berbasis pada keterlibatan aktif masyarakat dan pendekatan partisipatif, sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini, demi mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan bebas dari ancaman narkoba (*Drug Free Society*).

